

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari empat sub-bagian yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan garis besar untuk penelitian ini. Bagian latar belakang menguraikan alasan-alasan tentang pentingnya penelitian yang dilakukan. Bagian pernyataan masalah menyimpulkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Bagian tujuan penelitian dan manfaat memuat tujuan penelitian ini dan manfaat yang diberikan oleh penelitian tersebut. Sub-bagian terakhir menjelaskan garis besar atau struktur atau untuk tesis ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan dampak perubahan pada sistem pemerintahan yang mulanya menganut pola pertanggungjawaban terpusat beralih menjadi pola desentralisasi dimana daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari system pengelolaan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Keputusan pengalokasi anggaran pada Pemerintah Daerah secara teknis merupakan suatu proses yang kompleks. Proses ini selalu dihadapkan pada masalah utama, yaitu penentuan faktor yang menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya yang terbatas dengan tujuan untuk memaksimalkan utilitas sosial. Pada tingkat manajerial, tujuan dari kegiatan operasional pemerintah dalam pembuatan keputusan anggaran menggunakan pendekatan teknikal rasional (Gibran dan Sekwat 2009). Pendekatan ini membutuhkan

ketersediaan informasi yang cukup dalam penggunaan pembuatan keputusan alokasi anggaran dalam Pemerintah Daerah maupun untuk penilaian kinerja.

Informasi keuangan dan informasi non-keuangan merupakan salah satu aspek dalam menentukan pengalokasian anggaran. Informasi ini tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang saat ini diterapkan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Berdasarkan sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja. Oleh karena itu, kualitas output sangat menentukan kualitas belanjanya. Output yang baik akan memberikan outcome (hasil) dan benefit (manfaat) yang baik, sementara output yang buruk akan berakibat pada tidak optimalnya hasil sehingga belanja yang dikeluarkan pun tidak efektif. Selain itu, output yang baik adalah output yang disusun atas dasar analisis kebutuhan.

Penggunaan informasi keuangan dalam pembuatan keputusan dalam mengalokasi anggaran telah dikonfirmasi oleh Reck (2001) dan Dorta-Velazques et al (2010). Menurut Reck (2001) Informasi Keuangan berdampak signifikan dalam pengambilan keputusan. Informasi keuangan dapat diakses dari laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Salah satu informasi keuangan yang terdapat di laporan keuangan adalah piutang.

Dalam Pemerintah Daerah piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang daerah merupakan salah satu komponen

penting dalam neraca yang akan menambah aset lancar yang merupakan hak pemerintah daerah untuk menagih dan mencatatnya. Timbulnya piutang daerah pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan atas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah seringkali menjumpai kasus-kasus piutang daerah yang statusnya telah macet namun tidak ditindaklanjuti. Sebagai contoh adalah piutang atas tagihan Pajak Kendaraan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), piutang atas tagihan penjualan aset milik daerah, dan piutang atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun Tuntutan Perbendaharaan (TP). Status macet tersebut antara lain karena wajib pajak/retribusi dan/atau pihak yang memiliki kewajiban menyelesaikan piutang daerah tidak kooperatif, telah meninggal, dan/atau tidak diketahui keberadaannya. Piutang daerah yang statusnya macet serta kemungkinan besar akan tidak diterima oleh Pemerintah Daerah tersebut pada dasarnya hanya membebani pencatatan Neraca dalam LKPD. Nilai aktiva/harta Pemerintah Daerah dalam Neraca (berupa piutang daerah) seolah-olah besar, walaupun dalam prakteknya belum pasti piutang tersebut dapat tertagih. Upaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak diperlukan peran aktif setiap lapisan masyarakat untuk ikut serta melaksanakannya, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban pajak dengan membayar tepat waktu.

Sampling data piutang dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tiga tahun terakhir, jumlah piutang pajak senantiasa bertambah dari tahun ke tahun. Tunggakan terdiri dari dua kategori, yaitu tunggakan tahun berjalan (2022) dan tunggakan tahun lalu (2018-2022), berdasarkan data tunggakan posisi sampai dengan bulan Desember tercatat tunggakan tahun jalan (2022) sebesar Rp. 558.68 milyar sedangkan untuk tunggakan tahun

2017-2021 sebesar Rp. 2.116 milyar, maka dari itu diperlukan suatu sistem yang dapat menurunkan nilai tunggakan dan menaikkan pendapatan.

Jika suatu program akan dilaksanakan untuk tujuan tertentu tidak luput halnya belanja sebagai penunjang program. Dalam menentukan pengeluaran belanja dibutuhkan perencanaan. Salah satunya adalah perencanaan anggaran. Menurut Gilmour dan Lewis (2006) membuktikan bahwa informasi non-keuangan digunakan dalam membuat keputusan alokasi anggaran. Kartikahadi et al., (2019) menjelaskan penyajian informasi non-keuangan perlu disampaikan secara relevan dan terpercaya yang meliputi seluruh aktivitas yang berlangsung, sehingga seluruh informasi dapat tersampaikan secara menyeluruh dan lengkap untuk membantu dalam pengambilan keputusan.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pengelola pajak daerah dapat melakukan langkah strategis dalam menangani tunggakan Piutang Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Langkah yang dimaksud adalah penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang terdiri dari serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah daerah dalam rangka realisasi pencairan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkenalkan strategis khusus kegiatan door to door (D2D) untuk organisasi publik dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan administrasi.

Dalam konteks ini, informasi keuangan dan non-keuangan memainkan peran penting dalam penganggaran kegiatan D2D penagihan piutang pajak kendaraan bermotor. Informasi keuangan meliputi data keuangan terkait jumlah piutang pajak kendaraan bermotor yang harus ditagih, dan Realisasi Belanja. Informasi ini penting untuk mengalokasikan anggaran yang cukup untuk kegiatan D2D penagihan.

Selain informasi keuangan, informasi non-keuangan juga mempengaruhi penganggaran kegiatan D2D penagihan piutang pajak kendaraan bermotor. Informasi non-keuangan dapat mencakup data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Recap Call. Informasi ini membantu dalam merencanakan dan mengoptimalkan rute penagihan, mengidentifikasi daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam penagihan, serta menentukan strategi komunikasi yang efektif.

Dengan memiliki informasi keuangan dan non-keuangan yang memadai, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk kegiatan D2D penagihan piutang pajak kendaraan bermotor. Penganggaran yang efektif dan efisien akan membantu meningkatkan tingkat penagihan piutang, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah selaku Pemerintah Daerah menggunakan informasi non-keuangan dan keuangan untuk menilai kinerja UPPD dalam penganggaran penagihan pembayaran pajak kendaraan bermotor program door to door.

Berdasarkan permasalahan di atas dan dari hasil berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti dan dukungan klarifikasi hingga saat ini tentang pengaruh informasi keuangan dan non-keuangan terhadap anggaran. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian untuk tesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

Topik informasi keuangan dan non-keuangan bukanlah masalah baru dan telah menjadi perdebatan dan mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak. Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis pengaruh informasi keuangan dan non-keuangan terhadap pengalokasian anggaran. Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pejabat pengguna anggaran menggunakan informasi keuangan terhadap penganggaran kegiatan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor?
2. Bagaimana pejabat pengguna menggunakan informasi non keuangan terhadap penganggaran kegiatan penagihan piutang pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang informasi keuangan dan non keuangan terhadap pengalokasian anggaran. Tujuan dari penelitian ini dijelaskan berdasarkan rumusan masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh informasi keuangan terhadap penganggaran penagihan piutang pajak kendaraan bermotor.
2. Menganalisis pengaruh informasi non keuangan terhadap penganggaran penagihan piutang pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan praktisi. Bagi para praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur manajemen keuangan yang dapat melengkapi literatur praktik penganggaran yang ada di Pemerintah Daerah. Bagi pembaca beberapa wawasan tentang praktik pengalokasian anggaran yang dilakukan dari perspektif perencana anggaran dan dalam pengambilan keputusan.

Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang informasi keuangan dan non-keuangan terhadap pengalokasian anggaran. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan utama bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian selanjutnya.

Bagi pemerintah dan regulator, penelitian ini diharapkan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh informasi keuangan dan non-keuangan terhadap penganggaran. Selain itu meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penelitian

ini, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan dana publik untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pada gilirannya memberikan manfaat kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Mendorong kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dapat membantu dalam merancang strategi penagihan yang lebih efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

1.5 Garis Besar Penelitian

Penulisan penelitian dibagi menjadi lima bab:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari lima sub-bagian yang menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat, serta garis besar penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian ini dan hasil penelitian sebelumnya, kerangka teori, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan definisi operasional, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data serta metode yang digunakan untuk pengumpulan data, dan metode analisis penelitian.

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data dalam konteks pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang memaparkan simpulan seluruh pembahasan disertai keterbatasan dan saran untuk penelitian masa mendatang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori dasar yang digunakan sebagai dasar penelitian, juga hasil penelitian sebelumnya dan kerangka teori. Pada bagian akhir bab ini akan diuraikan praduga atau hipotesis beserta perkembangannya.

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Dalam sub-bab ini dijelaskan teori yang mendukung perumusan hipotesis terkait pengaruh Informasi Keuangan dan Non-Keuangan terhadap penganggaran.

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

(Godfrey, Hodgson, Tarca, Hamilton, & Holmes, 2010) menyebutkan bahwa Agency Theory ini digunakan untuk memahami hubungan dimana principal (shareholders) memperkerjakan agent (manager) untuk melaksanakan berbagai aktivitas atas nama mereka (principal) dan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada manager (to best interest of principals).

Menurut teori keagenan, salah satu cara yang diharapkan dapat menyelaraskan tujuan prinsipal dan agen adalah melalui mekanisme pelaporan (Luayyi, 2010). Informasi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian. Teori keagenan menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu, manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia selalu menghindari risiko (risk averse). Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan principal tidak mempunyai informasi yang cukup tentang kinerja agent. Ketika tidak semua keadaan diketahui oleh semua pihak dan sebagai akibatnya, ketika konsekuensi-konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh

pihak-pihak tersebut, hal ini mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent.

Agency Theory didasarkan pada asumsi bahwa masing-masing pihak adalah utility maximizer sehingga agen tidak selalu bertindak yang terbaik sesuai dengan keinginan Pejabat Pengguna Anggaran. Untuk mengurangi ketidaksesuaian tindakan agen dengan keinginan Pejabat Pengguna Anggaran tersebut, Pejabat Pengguna Anggaran perlu mendesain kontrak yang paling optimal dengan cara membangun skema reward.

Dalam perspektif pendelegasian tugas di pemerintahan yang mengikuti pola hierarki, suatu pendelegasian tugas termasuk dalam hubungan keagenan apabila memenuhi tiga syarat: (1) pekerjaan dari pemerintah didelegasikan kepada unit kerja yang lebih rendah, (2) pemerintah mengalokasikan sumberdaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan (3) pemerintah berkepentingan dengan capaian kinerja atas pekerjaan yang ditugaskan tersebut (Kivisto 2007).

Teori keagenan menjelaskan hubungan keagenan, yaitu suatu kontrak penugasan dari Pejabat Pengguna Anggaran kepada agen untuk melakukan beberapa pekerjaan yang sesuai kepentingan Pejabat Pengguna Anggaran melalui pendelegasian sebagian otoritas pembuatan keputusan kepada agen.

2.1.2 Anggaran

Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu / periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran, karena memiliki peran penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu satu tahun atau lebih.

Pejabat Pengguna Anggaran memerlukan pengukuran kinerja untuk mengevaluasi kinerja, tetapi pengukuran kinerja seringkali tidak dapat memberikan gambaran yang sebenarnya dari tindakan. Risiko pengukuran kinerja dapat dikurangi dengan menggunakan beragam ukuran, baik ukuran informasi keuangan maupun non-keuangan.

Pengukuran kinerja berkaitan erat dengan akuntabilitas. Esensi dari akuntabilitas adalah pemberian informasi dari satu pihak kepada pihak lain sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perilaku agen beserta konsekuensi dari perilaku tersebut. Informasi yang disampaikan bisa digunakan sebagai dasar pemberian sanksi dan reward. Pemberian sanksi yang berkinerja rendah melalui tindakan pemecatan terkadang sulit dilakukan oleh organisasi pemerintah/sector publik. Apabila ditemukan kesulitan untuk memberhentikan, maka tindakan lain yang dapat dilakukan adalah merubah alokasi anggaran (Weissman, 1983 dalam Reck, 2001).

Penggunaan anggaran sebagai reward dalam hubungan keagenan di sektor pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pentingnya anggaran bagi birokrasi. Peningkatan jumlah anggaran dapat digunakan untuk mewujudkan banyak tujuan, seperti reputasi publik, kekuasaan, dan peningkatan output dari instansi. Pemberian penghargaan anggaran bagi unit kerja atau satuan kerja yang berkinerja baik dikenal juga metode alokasi anggaran berbasis merit.

2.1.3 Informasi keuangan

Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi kepada pengguna. Laporan keuangan adalah informasi dalam laporan keuangan yang memiliki pengaruh material secara signifikan terhadap keputusan pengeluaran, penganggaran, atau keputusan finansial lainnya atau yang digunakan untuk menentukan kepatuhan pada hukum dan peraturan (Aman 2012).

Penggunaan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan dikenal dengan konsep decision usefulness. Konsep ini berintikan pada tujuan dari akuntansi, yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang digunakan dalam pembuatan keputusan. Suatu informasi dapat memenuhi kriteria decision usefulness apabila informasi digunakan untuk membuat keputusan tertentu, misalnya keputusan pengalokasian sumber daya (Deegan 2010).

Pendekatan decision usefulness dipakai secara luas oleh banyak standard setter dalam menyusun standar akuntansi (Scott 2009). Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (DSAP), sebagai standard setter SAP, juga menggunakan pendekatan decision usefulness sebagaimana tampak dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP 71/ 2010).

Untuk kepentingan pembuatan keputusan, cukup banyak data dalam laporan keuangan yang berpotensi memiliki kandungan informasi karena dinilai relevan dalam pembuatan keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi atas data dalam laporan keuangan yang dianggap paling penting oleh penggunanya, khususnya manajemen pemerintah. Selain itu, penentuan informasi yang relevan tersebut perlu mempertimbangkan kesesuaian informasi dengan kebutuhan Pejabat Pengguna Anggaran. Pejabat Pengguna Anggaran akan menganggap penting suatu informasi dalam laporan keuangan agen, apabila informasi tersebut juga menggambarkan kinerja Pejabat Pengguna Anggaran atau bersesuaian dengan tujuan Pejabat Pengguna Anggaran.

Jorge et al. (2008), Nogueira et al. (2013), serta Susanto dan Djuminah (2015) menemukan bahwa laporan keuangan yang dianggap paling bermanfaat bagi manajemen pemerintah dalam membuat keputusan. Piutang Pajak dan Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu informasi informasi keuangan. Hal ini penting bagi suatu negara/daerah dan mempunyai dampak terhadap keputusan ekonomi pemerintah. Ketika piutang pajak dibayar oleh wajib pajak, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan

meningkat. Sebagai fungsi anggaran, pendapatan negara merupakan sarana terbesar untuk membiayai pengeluaran negara. Selisih antara pengeluaran dan pendapatan negara ditutup dengan utang. Oleh karena itu, semakin besar piutang pajak yang dibayar oleh wajib pajak maka pendapatan negara akan semakin meningkat, utang pemerintah akan menurun, dan kinerja penagihan yang dilakukan oleh pemerintah dianggap semakin optimal. Selain itu jika Realisasi Belanja yang telah dianggarkan oleh Pejabat Anggaran telah terealisasi maksimal, maka pengguna anggaran mengoptimalkan anggarannya untuk program yang dijalankan dalam penagihan piutang.

Salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi / pendapatan nasional. Secara fungsional, perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan metode pengeluaran melibatkan variabel *government expenditure*. Oleh karena itu, rendahnya tingkat piutang pemerintah akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Informasi Non-Keuangan

Pengukuran Informasi non-keuangan dipercaya dapat meningkatkan informasi keuangan di masa yang akan datang. Pengukuran informasi non-keuangan diusulkan oleh program anggaran dalam mencapai kegiatan yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Fokus pada *value added* pelayanan pada masyarakat. Pemerintah lebih berorientasi pada kegiatan yang membutuhkan sistem pengukuran kinerja untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi organisasi. Strategi yang diterapkan dengan berorientasi pada kinerja keuangan jangka panjang. Sebagian besar pengukuran keuangan merefleksikan kinerja masa lalu tetapi tidak mengantisipasi yang akan datang atau *action* yang dibutuhkan untuk survive saat ini dalam lingkungan yang kompetitif.

Bukti menunjukkan banyak Instansi Pemerintah yang merubah sistem pengukuran kinerja mereka dengan menelusuri informasi non-keuangan dan mengevaluasi strategi

kompetitif. Para ahli dan praktisi menggunakan alasan yang beragam untuk menjelaskan penggunaan informasi non-keuangan untuk mengukur kinerja manajerial. Alasan yang paling umum didasarkan pada gagasan bahwa informasi non-keuangan merupakan tindakan manajerial yang memfokuskan perhatian pada jangka panjang dan langkah untuk mencapainya berisi informasi tentang kinerja yang tidak terdapat pada indikator finansial. Bukti menunjukkan bahwa informasi non-keuangan merupakan langkah-langkah yang berguna dalam memperkirakan informasi keuangan masa depan misalnya. Berdasarkan ide ini, para ahli dan praktisi menyatakan bahwa informasi Non keuangan dapat digunakan untuk mengatasi “Shor-termism” yaitu konsentrasi pada keuntungan langsung atau keuntungan dengan mengorbankan keamanan jangka panjang yang hanya mengandalkan informasi keuangan saja.

Alasan lain yaitu bahwa hanya pengukuran informasi non-keuangan yang dapat menyelaraskan upaya suatu organisasi dengan tujuan strategis. Pemikiran ini didasarkan pada gagasan bahwa pengukuran informasi non-keuangan dapat memberikan informasi strategis tentang proses internal, aset tidak berwujud, dan sebagainya yang sulit ditangkap dengan menggunakan hanya informasi.

Informasi Non-keuangan dalam kegiatan door D2D adalah bagaimana pihak pelaksana kegiatan memberikan data yang akurat dan tepat waktu. Informasi Non keuangan di dapatkan dari Tingkat Recap Call.

2.2 Penelitian Terdahulu

Bagian ini akan meringkas hasil penelitian sebelumnya yang dipelajari oleh peneliti sebelumnya tentang Informasi Keuangan dan Non Keuangan terhadap Anggaran. Rangkuman penelitian terdahulu dengan tema tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

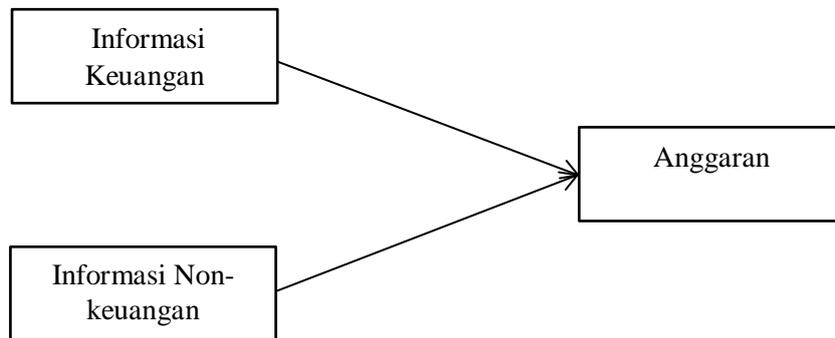
No.	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Makoto Kuroki, dan Katsuhiko Mutokawa (2021) <i>“Do Non-Financial Performance And Accrual-Based Cost Information Affect Public Sector Public Sector Budgeting ?”</i>	Variabel Dependen : Alokasi anggaran Variabel Independen : 1. Informasi Non-finansial 2. Basis Akrua	Informasi Non-Keuangan dan Basis Akrua berpengaruh terhadap Anggaran.
2.	Arif Sujoko, Nurkholis, dan Erwin Saraswati (2016) <i>“Penggunaan Informasi Finansial dan Kinerja Nonfinansial dalam Pengalokasian Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan”</i>	Variabel Dependen : Alokasi anggaran Variabel Independen : 3. Informasi Finansial 4. Informasi Kinerja Nonfinansial	Informasi finansial dan kinerja nonfinansial masing-masing memiliki pengaruh positif terhadap alokasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa informasi finansial dan kinerja nonfinansial digunakan dalam pembuatan keputusan alokasi anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3.	Reck (2001) <i>“The Usefulness of Financial dan Nonfinancial Performnace Information in Resource Alocasi Decision”</i>	Variabel Dependen : Keputusan Alokasi Variabel Independen : 1. Informasi finansial 2. Informasi Kinerja Non-Finansial	Pengujian menunjukkan bahwa keputusan alokasi yang dibuat oleh orang-orang ini tidak terkait secara signifikan dengan informasi non keuangan. Namun, informasi non-keuangan berpengaruh dalam evaluasi kinerja baik lembaga maupun direktur lembaga. Informasi keuangan berdampak signifikan terhadap evaluasi kinerja direktur agensi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Informasi keuangan dan Informasi Non keuangan merupakan variabel independent dan Anggaran merupakan variabel dependen Masing-masing variabel memiliki peran dan pengaruh yang berbeda.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dikembangkan hipotesis-hipotesis penelitian sebagai berikut :

2.3.1 Pengaruh Informasi Keuangan terhadap peningkatan Anggaran.

Berdasarkan Teori Keagenan hubungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (Badan Pengelola Pendapatan Daerah) dan Unit Pengeloaan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud UU 23/ 2014 pada hakikatnya merupakan bentuk hubungan keagenan. Dalam konteks desentralisasi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, sedangkan Unit Pengeloaan Pendapatan Daerah sebagai agen.

Agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan Pejabat Pengguna Anggaran, sehingga Pejabat Pengguna Anggaran perlu mengendalikan tindakan agen agar sesuai

dengan keinginannya, sebagai misal dengan memberikan reward. Sanksi dan reward dalam hubungan keagenan di sektor pemerintahan diwujudkan dalam bentuk perubahan alokasi anggaran (Weisman 1983 dalam Reck 2001).

Dalam hal ini, Pejabat Pengguna Anggaran dari memberikan reward berupa alokasi anggaran yang relatif banyak kepada agen yang bertindak sesuai dengan keinginan Pejabat Pengguna Anggaran. Oleh karena tindakan agen tidak dapat diamati secara langsung, Pejabat Pengguna Anggaran membutuhkan suatu informasi outcome sebagai dasar pemberian reward. Informasi ini akan menjadi input bagi pembuat keputusan yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan output berupa keputusan. Informasi outcome dari agen yang relatif baik dapat meningkatkan kepuasan Pejabat Pengguna Anggaran, sehingga agen akan mendapat reward alokasi anggaran yang relatif banyak.

Pemerintah Daerah memang tidak memiliki outcome finansial dalam bentuk profit, tetapi hal ini bukan berarti bahwa pemerintah tidak memiliki informasi keuangan sebagai dasar pembuatan keputusan. Laporan piutang pajak kendaraan bermotor sebagai sumber informasi keuangan disusun dengan menggunakan pendekatan decision usefulness. Penggunaan informasi keuangan dalam pembuatan keputusan alokasi anggaran telah dikonfirmasi oleh Reck (2001) dan Dorta-Velazques et al (2010).

Oleh karena hal tersebut di atas, peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut:

H1: Informasi keuangan yang baik dapat mempengaruhi peningkatan anggaran

2.3.2 Pengaruh Informasi Non-Keuangan terhadap anggaran.

Berdasarkan Teori Keagenan hubungan antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (Badan Pengelola Pendapatan Daerah) dan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud UU 23/ 2014 pada hakikatnya merupakan bentuk hubungan keagenan. Dalam konteks desentralisasi, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah bertindak sebagai Pejabat Pengguna

Anggaran, sedangkan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai agen. Agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan Pejabat Pengguna Anggaran, sehingga Pejabat Pengguna Anggaran perlu mengendalikan tindakan agen agar sesuai dengan keinginannya, sebagai misal dengan memberikan reward. Sanksi dan reward dalam hubungan keagenan di sektor pemerintahan diwujudkan dalam bentuk perubahan alokasi anggaran (Weisman 1983 dalam Reck 2001).

Penggunaan informasi keuangan sebagai ukuran kinerja tunggal tidak mampu memberikan gambaran terbaik atas kinerja agen. Untuk memperbaiki hal ini, menyarankan agar Pejabat Pengguna Anggaran menggunakan ukuran informasi yang beragam, baik ukuran keuangan, maupun non-keuangan. Penambahan ukuran informasi non-keuangan akan mampu menunjukkan kinerja yang seharusnya dicapai oleh Pejabat Pengguna Anggaran.

Informasi non-keuangan dapat berupa outcome yang merupakan alat ukur keberhasilan atau kegagalan suatu program. Agen yang memiliki kinerja outcome yang tinggi akan mendapat reward anggaran yang lebih besar (Robinson dan Brumby 2005). Dalam skema penganggaran kinerja yang menjadikan anggaran sebagai reward, informasi non-keuangan akan dikumpulkan terlebih dahulu dan alokasi akan dibuat berdasarkan informasi tersebut.

Pengaruh informasi non-keuangan dalam pembuatan keputusan alokasi anggaran telah dikonfirmasi oleh Gilmour dan Lewis (2006).

H2: Informasi Non-Keuangan yang baik dapat mempengaruhi peningkatan anggaran

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan variabel penelitian untuk penelitian ini dan menjelaskan definisi operasional dan pengukuran variabel. Bab ini juga berisi penjelasan dalam menentukan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian akan diuraikan pada bagian akhir bab ini

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Oprasional Variabel

Bagian ini berisi deskripsi tentang variabel-variabel yang didefinisikan secara operasional serta pengukuran variabel tersebut. Variabel dibagi menjadi 2, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Anggaran sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah informasi keuangan dan Informasi Non- Keuangan.

3.1.1 Definisi Oprasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat objek atau kegiatan yang dipilih oleh peneliti untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan. Masing-masing variabel harus didefinisikan dengan jelas dan rinci. Bagian ini akan menjelaskan tentang variabel, dimensi, indikator, dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Definisi Oprasional Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Pengukuran
1.	Anggaran	Alokasi Anggaran	Jumlah Alokasi Anggaran	Rasio
2.	Informasi Non-Keuangan	Kinerja Manajerial	Recap Call Piutang	Nominal

3.	Informasi keuangan	Laporan Keuangan	Jumlah Piutang Pajak	Rasio
----	--------------------	------------------	----------------------	-------

3.1.2 Variabel Dependen : Anggaran

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu organisasi pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan.

Fungsi anggaran adalah sebagai salah satu alat manajemen yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Perencanaan

Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan anggaran yang lainnya. Perencanaan yang menjadi aspek penting dengan menggunakan anggaran adalah perencanaan dana uang tersedia seefisien mungkin. Anggaran merupakan alat perencanaan tertulis yang menuntun pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang.

2. Fungsi Pelaksanaan

Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal keuangan). Pekerjaan disetujui untuk dilaksanakan bila ada anggarannya atau tidak menyimpang dari anggaran. Anggaran bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam mencapai tujuan.

3. Fungsi Pengawasan

Anggaran merupakan alat pengawasan atau pengendalian (Controlling). Pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan, dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan

melakukan Tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terdapat penyimpanan yang merugikan). Tujuan pengawasan ini bukanlah mencari kesalahan akan tetapi mencegah dan memperbaiki kesalahan.

Dalam penelitian ini alokasi anggaran adalah jumlah rupiah anggaran yang dialokasikan kepada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah dekonsentrasi dan tugas pembantuan Badan Pengelola Pendapatan Dearah Provinsi Jawa Tengah. Penetapan alokasi secara legal dilakukan dalam bentuk Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) di masing-masing Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) tahun 2018-2022.

$$Anggaran = Ln (Anggaran)$$

3.1.3 Variabel Independen : Informasi keuangan

Informasi keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan entitas pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006:239).

Informasi Keuangan pada peneliatian ini menggunakan informasi Piutang Pajak Kendaraan bermotor Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Porvinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022.

Laporan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor: Pengukuran jumlah piutang pajak kendaraan bermotor yang belum terbayar pada periode 2018-2022.

$$Piutang = Ln (Piutang)$$

3.1.4 Variabel Independen : Informasi Non-Keuangan

Pengukuran Informasi non keuangan lebih mengarah pada suatu proses kegiatan yang sedang berlangsung (bersifat operasional) yang digunakan adalah pengukuran kualitas, pengukuran kepuasan, pengukuran produktivitas, pengukuran waktu, dan lain-lain.

Informasi non-keuangan dalam penelitian ini adalah informasi outcome dari program penagihan piutang pendapatan pajak kendaraan bermotor yaitu D2D. Data ini diperoleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018-2022 :

- a. Recap Call: Pengukuran recap call center terhadap nomor kebenaran nomor telepon wajib pajak yang dilaporkan dari hasil kegiatan D2D dapat melibatkan beberapa variabel terkait. Recap Call terdiri dari Jumlah Wajib Pajak yang dihubungi dengan status Objek pajak status dimiliki, Objek pajak status dijual, Objek pajak status rusak berat, Objek pajak status hilang, Objek pajak status meninggal dunia tanpa ahli waris, Objek pajak status menutup usaha / pailit, Objek pajak status dicabut registrasi, Objek pajak status tidak diketahui kedudukan / alamat terakhirnya.

Informasi non-keuangan yang relevan terhadap pengukuran recap call center terhadap nomor kebenaran nomor telepon wajib pajak yang dilaporkan dari hasil kegiatan D2D dapat mencakup beberapa faktor sebagai berikut :

1. Tingkat Kualitas Data Telepon: Pengukuran tingkat kualitas data nomor telepon wajib pajak yang dilaporkan dari hasil kegiatan D2D. Hal ini mencakup keberlanjutan nomor telepon, kesesuaian dengan nama pemilik kendaraan, dan keaktifan nomor telepon. Data telepon yang tidak valid atau tidak terverifikasi dapat menghambat upaya penagihan dan efektivitas panggilan dari call center. Indikator diukur menggunakan :

$$\text{Tingkat Kualitas Data Telepon} = \text{Data telepon WP yang valid} / \text{Data telepon WP}$$

2. Ketepatan Informasi Kontak: Pengukuran tingkat ketepatan dan kebenaran informasi kontak yang dilaporkan oleh wajib pajak dari hasil kegiatan D2D. Ini mencakup aspek seperti nomor telepon, alamat, dan informasi kontak lainnya. Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai wajib pajak dan menyampaikan informasi tagihan dengan tepat. Indikator diukur menggunakan :

Ketepatan Informasi Kontak : Kebenaran informasi kontak / Data telepon WP

3. Tingkat Respons Wajib Pajak: Pengukuran tingkat respons dari wajib pajak terhadap panggilan dari call center yang didapatkan dari hasil kegiatan D2D. Hal ini mencakup sejauh mana wajib pajak merespons panggilan, apakah panggilan dijawab atau tidak, serta tingkat keramahan dan keterbukaan dalam berkomunikasi. Indikator diukur menggunakan :

Tingkat Respons Wajib Pajak = Respons dari WP terhadap panggilan dari call center / Data telepon WP

4. Tingkat Interaksi Positif: Pengukuran tingkat interaksi positif antara petugas call center dan wajib pajak yang dialami selama panggilan. Ini mencakup aspek seperti kejelasan informasi yang disampaikan, kesopanan, dan kemampuan petugas dalam menangani pertanyaan atau masalah dari wajib pajak. Indikator diukur menggunakan :

Tingkat Interaksi Positif = Interaksi positif WP / Data telepon WP

3.1.4.1 Dasar Hukum Penagihan Piutang Pajak

Berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 diatur beberapa hal sebagai berikut:

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui lima tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud diatas tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau ada pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

3.1.4.2 Penghapusan Piutang Pajak

Prosedur penghapusan piutang pajak daerah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2014. Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD yang meliputi pokok pajak, kenaikan, bunga dan denda. Piutang pajak timbul setelah ada Surat ketetapan Pajak Daerah dan atau Surat Tagihan Pajak Daerah. Terhadap piutang pajak tersebut perlu dilakukan upaya penagihan piutang pajak kendaraan bermotor .

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2022. Sampel dalam penelitian ini akan dipilih berdasarkan metode purposive sampling. Purposive sampling merupakan suatu metode pengambilan sampel menggunakan kriteria yang sudah ditentukan dan dipilih oleh peneliti.

Ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan, yaitu :

1. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki anggaran D2D.
2. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki piutang pendapatan pajak kendaraan bermotor.
3. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar.
5. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki recap call D2D.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder baik berupa lisan maupun tulisan. Data

diperoleh dari laporan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaporkan kepada Badan Pendapatan Pendapatan Daerah. Alasan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang mudah, biaya kecil, dan informasi yang didapat akurat.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, literatur, dan referensi tertulis lainnya.

2. Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa data Alokasi Anggaran, Laporan Informasi Keuangan dan Non-Keuangan.

3.5 Metode Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Penelitian ini menganalisis Alokasi Anggaran sebagai variabel dependen dengan variabel Independen yaitu Informasi Keuangan dan Non Keuangan.

3.5.1 Uji statistika Deskriptif

Uji statistika deskriptif merupakan salah satu bagian penting dalam suatu penelitian. Pengujian ini bertujuan untuk memberikan gambaran data yang ada dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian dapat dilihat dari mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan range. Pengujian ini membantu menjelaskan variabel-variabel agar mudah dipahami.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dan representatif dari model regresi dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik dibedakan menjadi

empat pengujian, yaitu uji normalitas data, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Bagian ini akan menjelaskan keempat pengujian tersebut secara rinci.

3.5.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel dependen, independen, dan keduanya memiliki distribusi normal. Suatu model regresi dinyatakan baik apabila memiliki data yang terdistribusi normal. Suatu model regresi dinyatakan tidak baik apabila memiliki data yang tidak terdistribusi normal.

Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara :

1. Analisa Statistik

Salah satu analisa statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas suatu data penelitian adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dilakukan dengan ketentuan (Ghozali, 2011):

- a. Distribusi dikatakan tidak normal jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas $< 0,05$
- b. Nilai signifikansi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dikatakan normal.

3.5.3.2 Uji multikolinieritas

Mengetahui apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel independen merupakan tujuan dari Uji multikolinieritas. Suatu model regresi dinyatakan baik apabila tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Multikolinieritas dapat dilihat dari dua ukuran, yaitu nilai tolerance dan lawannya dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan hubungan saling menjelaskan antar variabel independen. Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013). Jika dalam model regresi tidak ditemukan asumsi deteksi seperti di atas,

maka model regresi yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas, dan demikian pula sebaliknya.

3.5.3.3 Uji Autokorelasi

Menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ /sebelumnya adalah tujuan dari Uji autokorelasi (Tony Wikaya, 2009). Jika hasil deteksi menunjukkan adanya korelasi maka dinyatakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi.

Pengujian ini dapat menggunakan uji d Durbin Watson (uji DW) dengan bantuan SPSS. Pengambilan keputusan atau tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2014) :

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D-W di antara -2 dan $+2$ berarti tidak ada autokorelasi.

3.5.3.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi dalam penelitian terdapat varian residual yang tidak sama antar observasi (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Ada berbagai alat statistik untuk menguji heteroskedastisitas. Penulis menggunakan grafik scatterplot untuk prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residual (SRESID).

Scatterplot digunakan karena dapat memberikan gambaran heteroskedastisitas atau tidak dengan menampilkan grafik. Jika terdapat grafik yang menampilkan plot-plot yang tersebar dan tidak membentuk pola pada keseluruhan grafik, maka kesimpulan bebas membentuk heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser yaitu :

1. Nilai Sig $> 0,05$, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas

2. Nilai Sig. < 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Teknik ini akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Analisis regresi linear berganda merupakan model regresi simultan dimana terdapat permodelan kausalita yang disajikan dalam bentuk kausalitas berjenjang (Ferdinand, 2006).

Bentuk persamaan untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + X1 + X2 + e$$

Dimana :

Y : Anggaran D2D

X1 : Informasi Informasi keuangan

X2 : Informasi Kinerja Non-Keuangan

3.5.4 Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengujian hipotesis penelitian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Ketiga pengujian tersebut akan dijelaskan pada bagian ini.

3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai dari uji koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Terdapat dua data dalam pengujian ini, yaitu cross section dan time series. Cross section memiliki koefisien determinasi yang rendah, sedangkan time series memiliki koefisien determinasi yang tinggi.

Beberapa peneliti menggunakan nilai adjusted R Squared dimana nilai tersebut akan naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model (Ghozali, 2005).

3.5.5.2 Uji F

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikan sebesar 5% maka kriteria pengujian sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima. Dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama berpengaruh dengan variabel dependen.
2. Jika nilai signifikan $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak. Dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh dengan variabel dependen.

3.5.5.3 Koefisien Regresi Paralel (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, apakah variabel independen benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2013). Tingkat signifikan 0,05 atau 5% (lima persen) dilakukan saat menggunakan uji t. Hipotesis diterima atau ditolak dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima secara individu variabel ukuran.
2. Jika tingkat signifikansi $\geq 0,05$ maka hipotesis ditolak.